
PENGEMBANGAN MODEL PENDEKATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI PERGURUAN TINGGI SWASTA (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS INDONESIA MAJU)

Oleh

Catur Septiawan G¹, Erwin Sujana²

^{1,2}Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju

Email: ¹uima.penjaminmutu@gmail.com, ²erwinsujana@gmail.com,

Article History:

Received: 05-06-2022

Revised: 05-06-2022

Accepted: 20-07-2022

Keywords:

Model
Pendekatan, Implementasi
Kebijakan, Perguruan Tinggi
Swasta.

Abstract: *Pengembangan model pendekatan implementasi kebijakan di Universitas Indonesia Maju (UIMA) perlu dilakukan karena ada perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) ke UIMA berdasar Surat Keputusan Kemendikbud Ristek No. 0302/E1/KB.01.00/2022 tertanggal 17 Januari 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pendekatan implementasi kebijakan yang sesuai di Lingkungan Universitas Indonesia Maju (UIMA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Metode analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman. Penelitian ini berlangsung selama 1 (satu) bulan dengan informan sebanyak 7 (tujuh) orang. Hasil penelitian didapatkan bahwa UIMA mengembangkan model pendekatan implementasi kebijakan berdasarkan pendekatan perilaku. Saran dari hasil penelitian ini yaitu agar ada upaya yang maksimal untuk meningkatkan partisipasi berbagai pihak di dalam lingkup internal UIMA agar terlibat secara maksimal dalam rangka implementasi kebijakan di lingkungan Universitas Indonesia Maju (UIMA) sehingga berdampak positif bagi tercapai tujuan UIMA*

PENDAHULUAN

Universitas Indonesia Maju (UIMA) yang lahir berdasarkan Surat Keputusan Kemendikbud Ristek No. 0302/E1/KB.01.00/2022 tertanggal 17 Januari 2022, tentunya dalam perjalanannya untuk mengemban mandat yang telah di berikan oleh pemerintah tersebut akan menghadapi berbagai masalah. Oleh sebab itu, maka UIMA perlu mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Implementasi menurut Wahab, 2008 dalam Elih Yuliah, 2020¹ adalah Tindakan Tindakan

¹ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30 (2020): 129–153.

yang dilakukan oleh individu individu atau pejabat pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari pengertian implementasi kebijakan menurut Wahab tersebut terlihat jelas peran pentingnya implementasi kebijakan dalam menjalankan Universitas Indonesia Maju (UIMA) agar tercapai tujuan didirikannya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Aziz dan Abduh, 2019² serta Rusiati, 2006³ menunjukkan hasil yang berbeda mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi banyak factor. Hal ini sesuai yang di kemukakan oleh *Grindle* (1980) dan *Quade* (1984) dalam Imronah, 2009⁴ yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil sesuai tujuannya jika memperhatikan variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Banyaknya faktor serta model pendekatan implementasi kebijakan, maka perlu di pelajari, di pahami, dan di pilih sesuai dengan karakteristik UIMA sehingga dapat memberi nilai tambah untuk mencapai tujuan didirikannya UIMA. Oleh sebab itu penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan agar di peroleh model pendekatan implementasi kebijakan yang tepat sesuai dengan karakteristik UIMA.

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan

Pengertian Kebijakan

Kebijakan menurut *Anderson*, (1979) dalam Nuryanti, 2015⁵ dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang atau sejumlah aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Seorang pakar ilmu politik lain, *Carl Friedrich* mengatakan bahwa "Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan maupun kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu" (Budi Winarno, 2002) dalam Nuryanti, 2015⁶. Sementara itu, Amir Santoso (1993) dalam Nuryanti, 2015⁷, dengan membandingkan berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli di bidang kebijakan publik memberikan kesimpulan yaitu pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dibagi kedalam dua kategori. Pertama, pendapat para ahli yang berpandangan bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pendapat yang kedua adalah pendapat para ahli yang memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan (*policy implementation*). Kubu yang kedua ini masih dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai

² Muhammad Azis and Amirullah Abduh, "Kajian Kebijakan Proses Pengambilan Keputusan Di Perguruan Tinggi Di Era Revolusi Industri," *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 2, no. 2 (2019): 31.

³ Rusiati, "Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri i Wonogiri" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006).

⁴ Imronah, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal* 1, no. 8 (2009): 1-85.

⁵ Nuryanti Mustari, "Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)," *Kebijakan Publik Deliberatif* 1 (2015): 286.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

tujuan atau sasaran tertentu, dan mereka yang beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan/antisipasi sebelumnya. Para ahli yang termasuk dalam kubu pertama diwakili oleh *R.S. Parker* (1975) dan *Thomas R. Dye* (1978), *Edwards III* dan *Ira Sharkansky* dan *Carl Friedrick*. Menurut kubu ini kebijakan publik, secara ringkas terbagi dalam tiga tahapan proses, yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian perintah dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara cara mencapai tujuan tersebut”. Kubu kedua diwakili oleh *Pressman* dan *Wildavsky* (1974), mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengundang kondisi-kondisi awal serta akibat yang dapat diramalkan. Kubu kedua ini lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. (Budi Winarno, 2002 dalam Nuryanti, 2015⁸)

Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Wahab, 2008 dalam Elih Yuliah, 2020⁹ adalah Tindakan Tindakan yang dilakukan oleh individu individu atau pejabat pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut *Goerge C Edwards* (2003) dalam Nuryanti, 2015¹⁰ “Implementasi Kebijakan adalah suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya”. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli dalam menentukan tahapan implementasi kebijakan tersebut terlihat bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau pejabat-pejabat terhadap sesuatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat (Nuryanti, 2015)¹¹. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pandangan *Van Meter* dan *Horn* (Grindle, 1980) dalam Imronah, 2009¹² yang menyatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas suatu instansi/organisasi yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*). Hal ini sesuai yang di kemukakan oleh *Grindle* (1980) dan *Quade* (1984) dalam Imronah, 2009¹³ yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil sesuai tujuannya jika memperhatikan variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan.

⁸ Ibid.

⁹ Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies.”

¹⁰ Mustari, “Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik).”

¹¹ Ibid.

¹² Imronah, “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya.”

¹³ Ibid.

Model Pendekatan Implementasi Kebijakan

Berkenaan dengan pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan Hasbullah (2015) dalam Elih Yuliah, 2020¹⁴, menyatakan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Struktural. Pendekatan struktural ini merupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down*. Pendekatan ini memandang bahwa setiap kebijakan, termasuk pula kebijakan pendidikan, harus dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Pendekatan ini bersifat hirarkis-organik, sehingga relevan untuk situasi-situasi implementasi dimana didalamnya diperlukan organisasi pelaksana yang bertingkat dengan pola perubahan kebijakan yang tinggi.
- b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial. Pendekatan ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pada pendekatan struktural. Pendekatan ini berupaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan baik prosedur manajerialnya maupun teknik manajemennya.
- c. Pendekatan Perilaku. Pendekatan ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai pelaksana bukan pada organisasinya sebagaimana dua pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah bila perilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung baik. Pendekatan ini didukung oleh hasil penelitian Aziz dan Abduh, 2019¹⁵ yang dalam hasil penelitiannya menyebutkan kebijakan proses pengambilan keputusan yang paling di harapkan oleh seluruh subyek penelitiannya ialah gabungan *top down* dan *bottom up*. Sedangkan hasil penelitian Rusiati, 2006¹⁶ menunjukkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar Negeri 1 Wonogiri telah berjalan dengan baik khususnya tercapainya Visi dan Misi sekolah.
- d. Pendekatan Politik. Pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Pendekatan politik selalu mempertimbangkan atas pemantauan kelompok pengikut dan kelompok penentang beserta dinamikanya. Dalam pendekatan ini, memungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam peneltian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, *Focus Group Discussions (FGD)*, dan analisis dokumen. *FGD* yang di lakukan dengan melibatkan 7 (tujuh) informan yaitu Ketua Yayasan, Ketua Dewan Penyantun, 3 (tiga) Pimpinan UIMA yang terdiri dari Rektor dan 2 (dua)

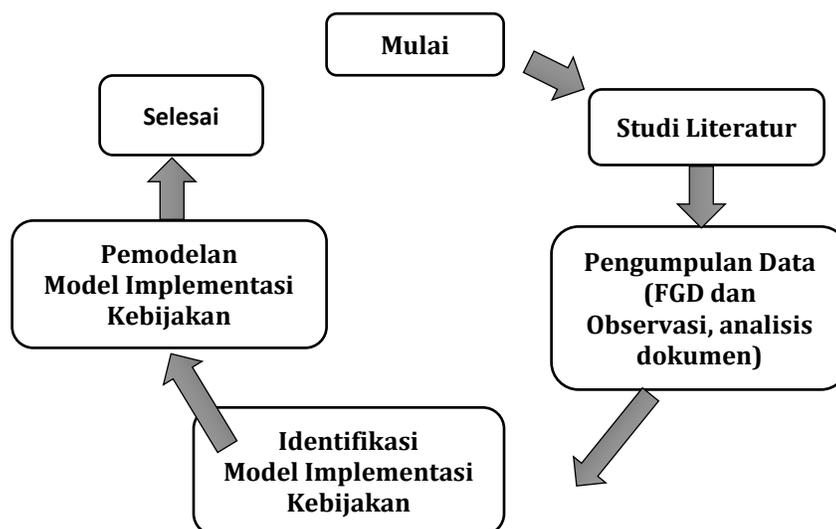
¹⁴ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies."

¹⁵ Azis and Abduh, "Kajian Kebijakan Proses Pengambilan Keputusan Di Perguruan Tinggi Di Era Revolusi Industri."

¹⁶ Rusiati, "Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri i Wonogiri."

wakilnya, Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Ketua Badan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Internal (BP3MI).

FGD di laksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 sedangkan waktu penelitian dilakukan selama bulan Januari 2022. Adapun secara umum, alur penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar. 01 Alur Penelitian

Tahapan alur penelitian di tunjukan pada gambar 01 tersebut dapat di jelaskan langkah langkah penelitian ini yaitu dimulai dari studi literatur mengenai Implementasi Kebijakan yang di peroleh baik dari buku maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang akan menjadi dasar penyusunan Implementasi Kebijakan di UIMA. Selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi, FGD, dan analisis dokumen internal yang ada di UIMA yaitu dokumen Statuta tahun 2022¹⁷, dokumen SP4 tahun 2022¹⁸, Pedoman Tata Kelola UIMA tahun 2022¹⁹, Kebijakan non Akademik UIMA Tahun 2022²⁰, Dokumen Kebijakan SPMI tahun 2022²¹, Dokumen Standar SPMI UIMA Tahun 2022²². Dari hasil pengumpulan data kemudian dilakukan analisis data menggunakan model *Miles* dan *Huberman*, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*). Untuk menjaga reliabilitas data dalam dalam penelitian ini, digunakan beberapa Teknik, diantaranya melakukan prosedur cek ulang secara benar, melakukan triangulasi data, yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta melibatkan banyak informan (7 informan). Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh pada saat waktu yang berbeda serta dengan menggunakan alat yang berbeda pula, yaitu dengan cara : 1)

¹⁷ UIMA, *STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA MAJU* (Jakarta: UIMA, 2022).

¹⁸ UIMA, *Pedoman Sistem Perencanaan Penyusunan Program Dan Penganggaran (Sp4) Universitas Indonesia Maju*, 1st ed. (Jakarta: UIMA, 2022).

¹⁹ UIMA, *PEDOMAN TATA KELOLA UNIVERSITAS INDONESIA MAJU, UIMA*, 1st ed. (Jakarta: UIMA, 2022).

²⁰ UIMA, *Kebijakan Non Akademik Universitas Indonesia Maju*, ed. UIMA, 1st ed. (Jakarta: UIMA, 2022).

²¹ BPPPMI UIMA, *Kebijakan SPMI Universitas Indonesia Maju*, ed. BPPPMI (Jakarta: UIMA, 2022).

²² BPPPMI UIMA, *Standar SPMI Universitas Indonesia Maju*, ed. BPPPMI UIMA, 1st ed. (Jakarta: UIMA, 2022).

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil FGD, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 4) membandingkan hasil FGD dengan hasil pengamatan dan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendeskripsikan model pendekatan implementasi kebijakan di Universitas Indonesia Maju sesuai dengan penjelasan Hasbullah, 2015 dalam Elih Yuliah, 2020²³. mengacu pada penjelasan Hasbullah tersebut, maka dilakukan FGD yang hasilnya seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 01 Hasil Penelitian (FGD dan Observasi)

Komponen Pertanyaan	Hasil
Model Implementasi Kebijakan yang tepat di UIMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model pendekatan struktural yang bersifat <i>top down</i> yang dilaksanakan sebelumnya saat masih status sekolah tinggi (STIKIM) Sudah tidak sesuai dengan perkembangan UIMA yang makin besar dan kompleks sehingga perlu mengadopsi model pendekatan perilaku dikarenakan makin besarnya organisasi UIMA maka perlu perilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus di pertimbangkan dan di pengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung baik. 2. Melibatkan partisipasi setiap elemen yang ada di UIMA akan berdampak positif terhadap hasil implementasi kebijakan yang dilaksanakan agar lebih akuntabel untuk mencapai tujuan UIMA.

Sumber: Hasil Pengumpulan data (FGD dan Observasi)

Dari hasil FGD terlihat jelas bahwa model pendekatan implementasi kebijakan yang berlaku sebelumnya saat masih berstatus sekolah tinggi/STIKIM yaitu model pendekatan struktural yang bersifat *top down* dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan UIMA yang makin besar dan kompleks sehingga perlu mengadopsi model pendekatan implementasi kebijakan perilaku yang mempunyai sifat melibatkan partisipasi setiap elemen yang ada di UIMA sehingga hasilnya lebih akuntabel untuk mencapai tujuan UIMA. Hal ini sesuai hasil juga hasil penelitian dari Aziz dan Abduh, 2019²⁴ yang dalam hasil penelitiannya

²³ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies."

²⁴ Azis and Abduh, "Kajian Kebijakan Proses Pengambilan Keputusan Di Perguruan Tinggi Di Era Revolusi Industri."

menyebutkan kebijakan proses pengambilan keputusan yang paling di harapkan oleh seluruh subyek penelitiannya ialah gabungan *top down* dan *bottom up*. Pendapat peneliti juga berpendapat bahwa untuk mengembangkan UIMA yang besar perlu melibatkan secara aktif semua yang ada di UIMA agar tercipta rasa memiliki sehingga mereka tergerak untuk mensukseskan semua program yang sudah di sepakati Bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu model pendekatan implementasi kebijakan struktural yang berlaku selama ini di STIKIM yang bersifat *top down*, perlu di ubah menjadi model pendekatan perilaku yang bersifat melibatkan secara aktif semua elemen yang ada di UIMA, yang tentunya mempunyai tantangan yang lebih kompleks dalam mencapai tujuan dari adanya UIMA. Sebagai dampak dari model pendekatan implementasi kebijakan perilaku, maka perlu ada upaya yang maksimal untuk meningkatkan partisipasi berbagai pihak di lingkup internal UIMA dalam rangka implementasi kebijakan di lingkungan Universitas Indonesia Maju (UIMA) berjalan secara efektif untuk mencapai tujuannya.

Penelitian ini hanya sebatas mengetahui model implementasi kebijakan yang akan di kembangkan di UIMA kedepannya, untuk mngetahui efektifitas dan efisiensi dari model pendekatan implementasi kebijakan perilaku maka di perlukan evaluasi lanjutan pada periode penelitian selanjutnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini, kami sebagai peneliti ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan usaha para *reviewer Journal of Educational and Language Research (JOEL)* Vol.1, No.7, Februari 2022, sehingga hasil penelitian kami dapat di publikasi sesuai dengan waktu yang di jadwalkan serta sesuai standar *Peer review*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Azis, Muhammad, and Amirullah Abduh. "Kajian Kebijakan Proses Pengambilan Keputusan Di Perguruan Tinggi Di Era Revolusi Industri." *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 2, no. 2 (2019): 31.
- [2]. Elih Yuliah. "Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies." *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30 (2020): 129–153.
- [3]. Imronah. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal* 1, no. 8 (2009): 1–85.
- [4]. Mustari, Nuryanti. "Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)." *Kebijakan Publik Deliberatif* 1 (2015): 286.
- [5]. Rusiati. "Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri i Wonogiri." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.
- [6]. UIMA. *Kebijakan Non Akademik Universitas Indonesia Maju*. Edited by UIMA. 1st ed. Jakarta: UIMA, 2022.
- [7]. *Pedoman Sistem Perencanaan Penyusunan Program Dan Penganggaran (Sp4) Universitas Indonesia Maju*. 1st ed. Jakarta: UIMA, 2022.
- [8]. *PEDOMAN TATA KELOLA UNIVERSITAS INDONESIA MAJU*. UIMA. 1st ed. Jakarta: UIMA, 2022.

- [9]. *STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA MAJU*. Jakarta: UIMA, 2022.
- [10]. UIMA, BPPPMI. *Kebijakan SPMI Universitas Indonesia Maju*. Edited by BPPMI. Jakarta: UIMA, 2022.
- [11]. *Standar SPMI Universitas Indonesia Maju*. Edited by BPPMI UIMA. 1st ed. Jakarta: UIMA, 2022.